

BAB 5

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sesuai dengan tujuan hipotesis yang dilakukan dengan analisis regresi linier berganda, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ukuran (*size*) pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. Kemandirian keuangan pemerintah daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah dan likuiditas berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah.

5.2. Keterbatasan

Berdasarkan verifikasi sampel dan hasil pengujian terhadap hipotesis, maka beberapa keterbatasan atau faktor-faktor yang tidak dapat diantisipasi dalam penelitian ini adalah:

- a. Periode penelitian yang digunakan untuk sampel penelitian ini hanya sepanjang 4 tahun.
- b. Penelitian ini menggunakan sampel laporan keuangan pemerintah daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sehingga hanya memberikan gambaran

tingkat pengungkapan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur saja.

5.3. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dijelaskan di atas, maka saran-saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut:

- a. Memperpanjang periode penelitian agar tren sampel penelitian lebih jelas dan menggunakan data laporan keuangan yang lebih baru, sehingga dapat memperoleh hasil terkini mengenai praktek pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah.
- b. Menggunakan sampel yang lebih banyak untuk meningkatkan kualitas hasil penelitian.
- c. Penggunaan variabel lain dapat ditambahkan, misalnya variabel tingkat pengungkapan dari sudut pandang politik atau *Good Corporate Government* atau pelayanan publiknya.
- d. Saat penelitian ini dilakukan, telah keluar peraturan SAP yang baru sehingga untuk penelitian selanjutnya dapat membandingkan pengungkapan dengan SAP yang lama dengan SAP yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L. S. dan I. Retrinasari, 2007, Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta, *Proceeding Seminar Nasional*, Universitas Trisakti.
- Badan Pemeriksa Keuangan, 2011, Laporan Hasil Pemeriksaan.
- Bastian, Indra, 2006, *Sistem Akuntansi Sektor Publik Edisi 2*, Jakarta: Salemba Empat.
- Ghozali, I., 2006, *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*, Cetakan IV, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, I., dan A. Chariri, 2007, *Teori Akuntansi*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A., 2007, *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3*, Jakarta: Salemba Empat.
- Hilmi, A. Z., dan D. Martani, 2012, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi, *Simposium Nasional Akuntansi XV*, Universitas Lambung Mangkurat: Banjarmasin.
- Jensen, M. dan W. Meckling, 1976, Theory of the Firm: Managerial Behavior Agency Cost, and Ownership Structure, *Journal of Finance Economics* 3, Hlm. 305-360.
- Kartika, Andi, 2009, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, *Kajian Akuntansi Vol 1 No 1*, 29-47.

- Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), 2008, *Konsep Pedoman Good Public Governance*.
- Laswad, F., Fisher, R., and Oyelere, P., 2005, Determinants of Voluntary Internet Financial Reporting by Local Government Authorities, *Journal of Accounting and Public Policy Vol 24*, 101-121.
- Mahmudi, 2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mandasari, P., 2009, Practices of Mandatory Disclosure Compliance in Indonesian Local Government. *Tesis Tidak Dipublikasikan*. Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Martani, D., dan L. Annisa, 2010, Local Government Financial Statement Disclosure in Indonesia, *Conference Proceedings: Asian Academic Accounting Association*.
- Na'im, A., dan Fuad R., 2000, Analisis Hubungan antara Kelengkapan Pengungkapan Laporan Keuangan dengan Struktur Modal dan Tipe Kepemilikan Perusahaan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, Vol.15: 70-82.
- Presiden Republik Indonesia, 2000, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia, 2003, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Presiden Republik Indonesia, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

- Presiden Republik Indonesia, 2008, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah.
- Presiden Republik Indonesia, 2010, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Sinaga, Y. F., 2011, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan di Internet Secara Sukarela oleh Pemerintah Daerah, *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Diponegoro: Semarang.
- Subramanyam, K. R., dan John J. Wild, 2010, *Analisis Laporan Keuangan Buku Dua Edisi Sepuluh*, Jakarta: Salemba Empat.
- Suhardjanto, D., dan Sigit I. L., 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib di Indonesia, *Prestasi Vol. 6 No. 2*, Desember 2010.
- Sumarjo, H., 2010, Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia), *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Universitas Sebelas Maret: Surakarta.
- Suwardjono, 2010, *Teori Akuntansi Perekayasaan Pelaporan Keuangan Edisi Ketiga*, Yogyakarta: BPFEE.